BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara seara keseluruhan. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh rakyat dan merupakan pembangunan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain.

Pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat (Anonim, 2004:21).

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban

daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggungjawaban horizontal *(horizontal accountability)* kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Hendri Edison , 2009)

Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konsep otonomi daerah maka diperlukan adalah ; pemberdayaan masyarakat, demokratisasi dalam arti pemberian tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, peluang untuk mempercepat perolehan kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan mutu layanan birokrasi, peningkatan mutu pengawasan melalui legislatif. (Hendri Edison, 2009)

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah ini dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah pusat terkait dengan adanya perbedaan persiapan daerah. Adi (2006) menunjukkan paling tidak terdapat dua hal penting yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu pertama adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan kedua adanya perbedaan kemampuan manajerial dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana. (Hendri Edison, 2009)

Pengendalian dan perencanaan juga berperan dalam keberhasilan otonomi daerah, Yuwono dkk, (2005:4) menyatakan bahwa sistem pengendalian

manajemen merupakan salah satu aspek manajemen yang berperan dalam pengendalian seluruh aktivitas organisasi agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan secara sistematis. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah sangat bergantung pada kemampuan membiayai kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam wewenang. Daerah yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang besar akan memperoleh pendapatan yang relatif besar dibandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai SDA. (Hendri Edison, 2009)

Pemberian tanggung jawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, selain itu pemerintah juga diharapkan agar dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya. (Budi S. Purnomo, 2009).

Seperti halnya wilayah daerah lain, kota Bandung juga diberi hak otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga intern daerah yang bersangkutan, dengan demikian berarti kota Bandung merupakan daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1998:116).

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, diperlukan kelembagaan yang demokratis, efisiensi pengelolaan sumberdaya, aparatur yang berkualitas, potensi ekonomi daerah yang dapat digerakkan sebagai pendapatan Daerah, dan pemberian insentif fiskal/non fiskal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta) serta pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang adil dan proporsional. Namun, dijumpai beberapa aspek yang satu dengan lainnya saling berkaitan dalam berbagai aktifitas perekonomian, misalnya budaya masyarakat setempat, ketersediaan lahan, pengadaan bahan, sumber pembiayaan, SDM dan aspek lainnya di daerah. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi adanya kesesuaian dan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, kekayaan alam, SDM, dan kondisi sosial ekonomi, serta latar belakang budaya.

Dalam kerangka teori yang dibangun oleh Paul Samuelson, Pendapatan nasional akan naik dan turun karena perubahan investasi. Menurut pandangan ini, maka pendapatan nasional dalam skala regional kita sebut dengan Pendapatan Daerah akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional dan juga Pendapatan Daerah akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun. Sehingga dengan demikian, kabupaten/kota yang merupakan tujuan investasi para pelaku bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah PAD-nya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang daya tarik investasinya rendah.

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dipicu pertumbuhannya, yang tentunya ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi (anonym, 2004:23).

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono,2003). Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan

ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006: 19). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 2005: 15). Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Investasi PMDN/PMA dan PDRB Kota Bandung selama sepuluh tahun terakhir, 2001 sampai dengan tahun 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Investasi PMDN/PMA Pemerintah Kota Bandung

dan Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)

Pemerintah Kota Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Nilai Investasi	PDRB atas dasar harga berlaku
2001	Rp 668.007.678,00	Rp 17.435.720,08
2002	Rp 745.643.000,05	Rp 20.690.499,64
2003	Rp 868.000.773,00	Rp 23.420.126,07
2004	Rp 948.846.784,00	Rp 27.422.417,80
2005	Rp 784.476.000,00	Rp 34.792.184,00
2006	Rp 984.937.000,00	Rp 29.431.046,06
2007	Rp 991.199.749,00	Rp 33.319.630,76
2008	Rp 1.477.033.716,00	Rp 38.282.169,44
2009	Rp 1.682.269.594,00	Rp 41.201.900,67
2010	Rp 1.882.376.683,07	Rp 36.092.238,72

Sumber : Pemerintah Kota Bandung, BPMP kota bandung &
Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Adapun fenomena khusus yang terjadi di DPPKAD dapat dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak sesuainya kenaikan tingkat investasi dengan PDRB. Dimana nilai investasi melonjak naik dari tahun sebelumnya sedangkan PDRB turun dari tahun sebelumnya. Investasi seharusnya dapat mendongkrak tingkat kenaikan PDRB, dengan adanya investasi seharusnya mampu membuka lapangan-lapangan usaha baru sehingga dapat menaikan tingkat PDRB kota Bandung.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi,

meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.

Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi kota Bandung relatif tumbuh di bawah angka investasi dan PAD pada tahun 2010. Beberapa faktor yang nampaknya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandug adalah faktor nilai penanaman modal asing (PMA), nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan uraian diatas maka apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pendapatan melalui kerja sama dengan pihak lain termasuk masyarakat yaitu dengan melalui investasi atau penanaman modal untuk meninkatkan perekonomian pada suatu daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ”.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Investasi yang melemah dari tahun 2005 dan 2010
2. Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008 dan 2009.
3. PDRB yang turun yaitu pada tahun 2006 dan 2010.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pemerintah kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pemerintah kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan baik secara simultan maupun parsial terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk menjawab masalah-masalah tertentu yang ada kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan baik secara simultan maupun parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada dinas pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi dinas yang diteliti, diharapkan akan memberikan informasi tentang Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga bisa digunakan dalam mengamati peningkatan serta penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dipengaruhi oleh Tingkat Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi pegawai pemerintah yang diteliti, diharapkan memberikan informasi tentang sejauh mana Tingkat Investasi dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai Analisis Investasi dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berpengaruh Terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Pemerintah Kota Bandung.

2 Bagi Instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Analisis Investasi dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berpengaruh Terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Analisis Investasi dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Berpengaruh Terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukancana No. 2 Telp. 022-4230393 dan BAPPEDA Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Tamansari No. 76. Telp: 022-2500950

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan Febuari 2012